

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masjid merupakan salah satu organisasi sektor publik yang tergolong dalam organisasi nonlaba (*nonprofit oriented*) yang dalam menjalankan aktivitasnya dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya dan sumber daya yang diperoleh dari masyarakat secara sukarela dan ikhlas. Perlu adanya pengelolaan yang baik terkait sumber daya masjid. Masjid harus menerapkan akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hasil pengelolaan keuangannya. Untuk memenuhi akuntabilitas dan transparansi dibutuhkan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.

Masjid Agung Miftahul Jannah merupakan masjid yang berada di daerah Wlingi, Kabupaten Blitar. Selain untuk kegiatan keagamaan, masjid ini juga menyajikan pemandangan yang luar biasa. Masjid ini memiliki interior yang indah dengan konsep bangunan ala turki atau modern serta fasilitas yang banyak dan bersih sehingga menarik perhatian masyarakat. Disamping itu, berlokasi disebelah MAN 2 Blitar membuat masjid ini sebagai pusat dakwah, pusat ibadah, serta pusat ilmu dan lain sebagainya.

Masjid Agung Miftahul Jannah dijadikan sebagai objek penelitian karena masjid ini merupakan salah satu masjid terbesar di Kabupaten Blitar serta letaknya yang strategis dan sering dilakukan berbagai kegiatan peribadatan sekaligus masjid ini termasuk unggul dalam jumlah jamaahnya. Selain itu juga adanya petugas keamanan dan perolehan keuangan masjid yang berasal dari infaq perorangan, infaq ketika jum'atan, infaq akad nikah, dan lain sebagainya. Lokasi Masjid Agung Miftahul Jannah menjadi satu dengan ma'had dan MAN 2 Blitar, sehingga dana masjid juga diperoleh dari income atas pemberdayaan ekonomi di halaman masjid.

Berdasarkan hasil observasi pada tahap pra penelitian, diperoleh gambaran dari beberapa jama'ah Masjid Agung Miftahul Jannah bahwa seluruh pengelolaan keuangan masjid diserahkan kepada takmir tanpa harus tau berapa uang tersebut, dimana, dan digunakan untuk apa. Dalam arti masyarakat percaya sepenuhnya kepada para takmir masjid. Walaupun begitu, pengurus masjid tetap berusaha memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan tersebut, seperti salah satunya memaparkannya di papan tulis yang berada di masjid sehingga masyarakat mengetahui alur dana masjid setiap bulannya. Masjid Agung Miftahul Jannah hanya mencatat sebatas kas masuk dan kas keluar secara sederhana dan belum menerapkan ISAK 35 dalam pencatatannya. Dengan kata lain, praktik pelaporan keuangan masjid selama ini belum sepenuhnya dilakukan secara akuntabel dan transparan.

Menurut Dewan Masjid Indonesia (DMI) terdapat tiga fungsi masjid. Pertama, masjid sebagai ibadah (mdlahah) juga merupakan tempat ibadah secara luas (ghairu madlah) selama dilakukan dalam batas-batas syariah. Kedua, masjid sebagai wadah pengembangan masyarakat melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki masjid yang bersangkutan. Ketiga, masjid sebagai pusat komunikasi dan persatuan umat.¹

Masjid merupakan organisasi yang tergolong dalam organisasi nirlaba (nonlaba). Organisasi nonlaba atau entitas berorientasi nonlaba merupakan entitas yang memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Entitas nonlaba didirikan oleh masyarakat atau dikelola oleh swasta. Sumber dana yang didapat oleh entitas nonlaba biasanya berasal dari para donatur atau penyumbang yang tidak mengharapkan imbal balik atas dana yang diberikan.² Jadi organisasi berorientasi nonlaba merupakan entitas yang tanpa bertujuan untuk menuntut laba atau keuntungan yang didirikan atau dikelola oleh swasta. Organisasi yang tergolong dari entitas nonlaba yakni organisasi pemerintahan, organisasi pendidikan, organisasi kesehatan, organisasi keagamaan, dan lain-lain.

Masjid merupakan bagian dari sektor publik yang dimana pengurus perlu membuat pertanggungjawaban atas keuangan sebagaimana yang

¹ Lutfhi Mafatih Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan : Pemahaman Fikih dan Hukum Positif*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hal. 75

² Ikatan Akuntan Indonesia, *DE PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntan Keuangan Ikatan Indonesia , 2018), hal. 8

diperintahkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 282 bahwa dianjurkan melakukan pencatatan laporan keuangan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Masjid sebagai bagian dari kehidupan umat muslim tidak terlepas dari transaksi keuangan. Tuntutan Al-Baqarah ayat 282 tersebut dengan segala perangkatnya dihubungkan dengan kondisi nyata dalam praktek. Terdapat kesenjangan yang sangat menyolok sehingga menjadikan hal yang menarik untuk diteliti secara mendalam sejauh mana akuntansi syariah yang telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan masjid.³

Seiring dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat muslim di Indonesia, banyak masjid-masjid yang mempunyai aset, baik aset fisik maupun aset keuangan yang cukup besar untuk ukuran organisasi keagamaan. Berikut adalah contoh data nilai rata-rata arus kas pada masjid besar:

³ Mhd Syahman Sitompul, et.all., *Akuntansi Masjid*. (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015), hal. 4

Tabel 1.1
Nilai Rata-Rata Arus Kas Masuk per Bulan Masjid Besar

No	Nama Masjid	Luas (m2)	Arus Kas Masuk per Bulan
1	Masjid Sabilillah Malang	16.000	120.000.000
2	Masjid Nurul Muttaqin	900	43.000.000
3	Masjid Fathul Huda	500	20.000.000
4	Masjid Ali Nasrudin	450	20.000.000

Sumber: Manajemen Kas Masjid⁴

Dari besarnya arus kas masjid tersebut, maka pengelolaan keuangan yang baik sangat penting dilakukan demi kelangsungan segala aktivitas dan kegiatan yang ada di masjid. Untuk menjaga optimalisasi pengelolaan keuangan masjid, maka perlu adanya jajaran takmir (pengurus masjid) yang kompeten, jujur, dan amanah dalam memangku tanggung jawab tersebut.

Penerapan ilmu ekonomi khususnya pada bidang ilmu akuntansi bukan hanya berkembang pada organisasi berorientasi laba melainkan juga berkembang dalam organisasi nonlaba. Diperlukan pengelolaan dana masjid yang memuat prinsip-prinsip dan asas *Good Corporate Governance* (GCG) khususnya pada asas akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelolanya. GCG tidak hanya diterapkan dalam organisasi komersial saja namun juga pada organisasi nonlaba. Sehubungan dengan pelaksanaan GCG, pemerintah juga semakin menyadari perlunya penerapan GCG pada sektor publik atau organisasi nonlaba.⁵

⁴ Ely Siswanto, Rizal Efendy, Abdullah Razak, *Manajemen Kas Masjid*, (Malang: UM, 2020), hal 6

⁵ Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, *Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia*, (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006), hal 4

Akuntabilitas dan transparansi merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan dalam organisasi atau lembaga publik baik yang swasta maupun lembaga keagamaan.⁶ Akuntabilitas keuangan organisasi masjid bersandar pada kekuatan sistem pengendalian internal dan kinerja pengelolaan keuangan organisasi yang harus dikembangkan secara spesifik sesuai karakteristik khusus organisasi masjid. Akuntabilitas pada pengelolaan keuangan masjid adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap penyusunan dan transparansi atas laporan keuangan yang dimiliki oleh masjid.

Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan. Organisasi dituntut menyediakan informasi yang jelas, tepat waktu, dan akurat. Informasi yang akurat dapat dicapai dengan didukung sistem akuntansi yang baik dalam pengungkapan yang wajar dan transparan atas semua kegiatan yang dilakukan. Dengan kata lain, transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian informasi yang dimiliki.⁷

Sebagai organisasi nonlaba dibidang keagamaan, masjid diharapkan amanah terhadap dana yang telah masuk kepada kas masjid dengan melakukan penyusunan laporan keuangan secara detail dan terperinci. Setiap pemasukan dan pengeluaran masjid harus dicatat sebagaimana mestinya dan pencatatan itu sendiri harus berdasarkan

⁶ *Ibid.*, hal. 5

⁷ Arifin, *Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indoensia*, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro: 2005)

dengan prinsip akuntansi yang sudah menjadi standarnya. Hal ini dilakukan agar membuat setiap pencatatan itu tercatat secara terstruktur sesuai dengan akun dan mudah dipahami oleh masyarakat sebagai para jamaah masjid yang menjadi salah satu pemakai laporan keuangan.

Salah satu standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang organisasi nonlaba yaitu ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba sebagai pengganti PSAK 45 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Dengan keluarnya peraturan baru ini maka organisasi nonlaba menyusun laporan keuangannya sesuai dengan ISAK 35. Laporan keuangan yang terstruktur seperti diatur dalam ISAK 35 dapat dijadikan pedoman untuk membuat laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akuntabel dan transparan. Secara tidak langsung, dikatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi dapat tercapai melalui penyajian laporan keuangan yang baik yaitu sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku.

Realitanya sampai saat ini penerapan pedoman laporan keuangan organisasi nonlaba termasuk masjid belum terealisasi dengan baik, yang artinya masih terkendala dalam penerapannya sesuai standar yang berlaku yaitu ISAK 35 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.

Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Esmeralda Elfaradayanti dengan judul “Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan

ISAK 35 pada Masjid agung Khairullah”⁸ dan Endang dengan judul “Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Jamik An-Nur Sekayu”.⁹ Melihat hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang hendak dilakukan yakni penelitian terdahulu yang pertama hanya berfokus pada ISAK 35 saja. Dan yang kedua hanya berfokus pada akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti menggabungkan antara akuntabilitas dan transparansi serta kesesuaian laporan keuangan dengan standar ISAK 35.

Berdasarkan pemaparan diatas, muncul ide dalam penyusunan tugas akhir dengan judul “Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Agung Miftahul Jannah di Kabupaten Blitar berdasarkan ISAK 35”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana akuntabilitas yang diterapkan oleh Masjid Agung Miftahul Jannah di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana transparansi yang diterapkan oleh Masjid Agung Miftahul Jannah di Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana kesesuaiannya dengan ISAK 35 mengenai penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba?

⁸ Esmeralda Elfaradayanti, “Penyusunan Laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 pada Masjid Agung Khairullah”, (Skripsi Poliban, 2021)

⁹ Endang, “Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Jamik An-Nur Sekayu”, *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, Vol. 6, No. 1 (2017)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akuntabilitas yang diterapkan oleh Masjid Agung Miftahul Jannah di Kabupaten Blitar
2. Untuk menganalisis transparansi yang diterapkan oleh Masjid Agung Miftahul Jannah di Kabupaten Blitar
3. Untuk menganalisis kesesuaiannya dengan ISAK 35 mengenai penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba

D. Batasan Masalah

Good Corporate Governance memiliki beberapa prinsip yaitu akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban, kemandirian, dan keadilan. Permasalahan yang akan dibatasi dalam penyusunan penelitian ini adalah peneliti akan lebih memfokuskan tentang akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada ISAK 35. Karena kedua prinsip tersebut yang paling berperan besar dalam hal penyusunan laporan keuangan masjid.

E. Manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan pengembangan di bidang laporan keuangan yang ada pada Masjid Agung Miftahul Jannah Kabupaten Blitar agar sesuai dengan ISAK 35 sehingga praktik pembukuan dan pelaporan keuangan masjid bisa lebih akuntabel dan transparan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pelaporan keuangan masjid yang akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip akuntansi. .

b. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pembendaharaan perpustakaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Masjid Agung Miftahul Jannah Kabupaten Blitar

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan membagikan tujuan yang berguna untuk perkembangan dan kemajuan Masjid Agung Miftahul Jannah Kabupaten Blitar terutama dalam bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya yang sesuai dengan ISAK 35.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi atau sebagai bahan masukan yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang terkait.

F. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

Mempermudah mengenai pemahaman judul penelitian tentang “Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Agung Miftahul Jannah Kabupaten Blitar berdasarkan ISAK 35”, maka penulis memberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut:

a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya.¹⁰ PSAK adalah suatu kerangka prosedur petunjuk untuk pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisi peraturan yang berkaitan dengan pencatatan penyusunan perlakuan serta penyajian laporan keuangan yang memiliki tujuan umum (*general purpose financial statements*).

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan sumber keuangan. Akuntabilitas merupakan kewajiban

¹⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, “*Pengertian Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*” dalam <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sak>, diakses pada 27 November 2022

untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja, tindakan seseorang, badan hukum dan pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, meliputi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

c. Transparansi

Transparansi artinya memastikan bahwa informasi tersedia yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pihak berwenang dan untuk menjaga dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pengertian ini, transparansi berfungsi untuk mencapai akuntabilitas yang berarti bahwa pihak berwenang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Organisasi transparan ketika mereka memungkinkan orang lain untuk melihat dan memahami bagaimana mereka beroperasi dengan cara yang jujur. Transparansi merupakan implementasi dari prinsip keterbukaan, dimana organisasi harus menyediakan informasi tentang kegiatan dan tata kelolanya kepada pemangku kepentingan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.¹¹

d. Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk

¹¹ Arisdha Khairun Nisa, "Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Laporan Keuangan dalam Mengelola Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Masjid Agung Al-Umaraini dan Partai Keadilan Sejahtera)", dalam *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin, 2017), hal.12

mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang menunjukkan kondisi keuangan dan kinerja.¹²

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual, maka secara operasional tentang “Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Agung Miftahul Jannah Kabupaten Blitar berdasarkan ISAK 35” merupakan pengkajian terhadap bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid serta kesesuaiannya dengan pernyataan standar akuntansi keuangan pada laporan keuangan masjid dengan pedoman ISAK 35 untuk menilai implikasinya pada Masjid Agung Miftahul Jannah Kabupaten Blitar.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan tugas akhir ini, agar pembahasan dalam penelitian lebih terarah serta mudah dipahami dan memberikan gambaran kepada pembaca dengan membuat sistematika penulisan skripsi yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

¹² Hery, *Analisis Laporan Keuangan Integrated on Comprehensive Edition*. (Jakarta : PT Grasindo, 2016), hal 3.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi kerangka teori dan kajian penelitian terdahulu yang diangkat dari berbagai sumber seperti buku, kripsi, tesis, jurnal penelitian, disertasi, dan laporan penelitian. Pembahasan yang dilakukan meliputi Akuntabilitas dan transparansi serta penyusunan laporan keuangan masjid sesuai dengan ISAK 35.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tahap-tahap penelitian, dan pengecekan keabsahan temuan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh melalui pengamatan (sesuai yang terjadi di lapangan), hasil wawancara (apa yang dikatakan narasumber atau informan), serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data sebagaimana diatas.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini berisi penguraian tentang keterkaitan antara teori yang ditemukan terhadap teori sebelumnya serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (grand theory).

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di awal dengan pengajuan saran atau rekomendasi peneliti.